

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Kerjasama

1. Pengertian Manajemen Kerjasama

Manajemen memainkan peran penting pada suatu organisasi. Karena langkah pertama dalam membentuk suatu organisasi adalah menetapkan tujuan, visi, dan misi. Manajemen bertindak sebagai elemen kunci, dalam menggapai tujuan ini dilakukan dengan cara merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Secara etimologis, istilah “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “to manage” yang berarti mengatur dan mengelola.

Manajemen kerjasama menurut G.R. Terry adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk membangun, mengelola, dan mengarahkan kerjasama antara individu, kelompok, atau lembaga guna mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara optimal dan tepat guna.⁷

Menurut Malayu S. P. Hasibuan, manajemen kolaboratif adalah disiplin ilmu dan seni untuk penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Dari pernyataan tersebut, kata ilmu dan seni yaitu bukan hanya soal teori atau

⁷ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2008).

struktur dalam mengelola kerjasama, tetapi juga membutuhkan keterampilan interpersonal dan kemampuan membangun hubungan yang harmonis. Manajemen kerjasama berfokus pada bagaimana menciptakan sinergi antar pihak yang terlibat agar kerja tim atau kolaborasi berjalan optimal.⁸

Manajemen kerjasama menekankan bahwa hubungan antar individu, kelompok, maupun lembaga tidak bisa hanya mengandalkan niat baik, melainkan harus dikelola secara terstruktur. Dengan kata lain, setiap tahapan kerjasama dari mulai kesepakatan awal, pembagian peran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil semuanya harus dirancang secara manajerial agar kerjasama tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Max Weber, melalui teori birokrasi, memberikan landasan penting dalam bagaimana organisasi menjalankan kerjasama secara efisien. Struktur yang jelas, pembagian tugas, dan pengawasan yang sistematis menjadi bagian integral dalam menciptakan kerjasama yang produktif dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen kerjasama yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses kerja sama itu sendiri agar berjalan tertib dan akuntabel.⁹

Dengan demikian, manajemen kerjasama bukan hanya tentang “bekerja sama,” tetapi tentang bagaimana merancang dan mengelola kerja sama tersebut secara profesional, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam lingkup lembaga pendidikan misalnya, manajemen kerjasama berperan besar dalam

⁸ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

⁹ H. Rocharat Harun, *Komunikasi Organisasi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).

menghubungkan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), demi meningkatkan kompetensi peserta didik secara relevan dan aplikatif.

Kesimpulannya, manajemen kerjasama adalah proses manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap hubungan kerjasama antar pihak yang dilakukan secara sistematis, efektif, dan efisien guna mencapai tujuan bersama.

2. Fungsi Manajemen Kerjasama

George R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen. Para ahli mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang melibatkan penentuan langkah awal yang perlu diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan juga mencakup upaya mengantisipasi dan mempersiapkan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi di masa mendatang, serta menetapkan strategi atau taktik yang tepat guna mewujudkan target organisasi.¹⁰

Perencanaan memiliki fungsi utama sebagai pedoman kerja dalam mencapai tujuan organisasi secara sistematis dan terarah. Melalui perencanaan, organisasi dapat menetapkan sasaran yang jelas, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan, mengalokasikan

¹⁰ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

sumber daya secara efisien, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan atau risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Perencanaan juga membantu menyelaraskan tugas dan tanggung jawab antar bagian dalam organisasi, sehingga proses kerja menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Dengan demikian, perencanaan berperan penting dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Tujuan diadakannya perencanaan ialah:

- 1) Berfungsi sebagai tolok ukur pengawasan, mengevaluasi sejauh mana penerapan kegiatan mematuhi rencana yang ditetapkan.
- 2) Mengetahui kapan waktu pelaksanaan dan penyelesaian suatu kegiatan.
- 3) Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mendapatkan kegiatan yang sistematis, termasuk dalam hal pengaturan biaya dan kualitas pekerjaan.
- 5) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif serta menghemat biaya, tenaga, dan waktu.
- 6) Memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan.
- 7) Menyeraskan dan memadukan beberapa subkegiatan agar saling mendukung.
- 8) Mendeteksi hambatan atau kesulitan yang mungkin akan dihadapi selama proses pelaksanaan.

9) Mengarahkan seluruh kegiatan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹

Menurut Wena, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam membangun kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

- 1) sekolah harus memilih mitra industri yang sesuai dan relevan sebagai tempat pembelajaran bagi siswa.
- 2) sekolah melakukan kunjungan langsung ke pihak industri guna menjalin hubungan kerja sama. Dalam kunjungan tersebut, pihak sekolah menyampaikan maksud, bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, dengan harapan industri bersedia memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara langsung di tempat tersebut.
- 3) apabila pihak industri menyetujui kerja sama tersebut, maka perlu dibuat sebuah perjanjian tertulis yang memuat ketentuan mengenai tujuan, bentuk kegiatan, pelaksanaan kerja sama, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak. Keempat, setelah perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kerja sama dapat segera diimplementasikan dalam bentuk kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi siswa.

¹¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktek Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan mengatur dan membagi pekerjaan di antara anggota kelompok serta menetapkan hubungan kerja yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengorganisasian melibatkan pengaturan seluruh sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sehingga setiap tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien hingga pekerjaan selesai dengan sukses.¹²

Kesimpulannya, pengorganisasian adalah cara mengatur siapa melakukan apa, bagaimana tugas-tugas itu diatur, dan siapa bertanggung jawab, agar semua sumber daya dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bersama

Tujuan utama dari proses pengorganisasian dalam lembaga pendidikan adalah untuk menciptakan struktur kerja yang jelas, efektif, dan efisien sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan secara terkoordinasi. Adapun tujuan spesifik dari proses pengorganisasian antara lain:

- 1) Mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab di lingkungan lembaga pendidikan secara sistematis, agar setiap individu maupun unit kerja memahami peran masing-masing dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Memperlancar kerjasama antar individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pendidikan, sehingga tercipta sinergi dan koordinasi yang baik di tingkat satuan pendidikan.

¹² George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

- 3) Mengatur alur hubungan kerja antar orang, badan, serta unit kerja dalam lembaga pendidikan guna menciptakan kerja tim (teamwork) yang solid dan harmonis.

Dari proses tersebut kemudian akan dilanjutkan pada proses pelaksanaan kerjasama sekolah.

c. Pelaksanaan

Implementasi atau eksekusi merupakan kegiatan yang memotivasi seluruh anggota kelompok untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh kegiatan difokuskan pada implementasi apa yang telah dirumuskan dalam rencana awal, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Tahap eksekusi bertujuan untuk mewujudkan rencana tersebut menjadi tindakan konkret guna menghasilkan hasil kerja yang terukur dan sesuai dengan tujuan organisasi.

d. Evaluasi

Controlling (pengawasan, evaluasi, dan pengamatan) adalah kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan.

Adapun fungsi evaluasi program dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:¹³

¹³ Sri Ninarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

- 1) Evaluasi berfungsi selektif, evaluasi ini sebagai alat untuk melakukan seleksi terhadap berbagai kinerja dalam pelaksanaan program, termasuk program hubungan masyarakat (humas) atau program-program lainnya di sekolah. Melalui hasil evaluasi, pihak sekolah dapat menentukan apakah suatu kegiatan perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bersifat selektif terhadap efektivitas dan relevansi program yang dilaksanakan.
- 2) Evaluasi berfungsi diagnostik, Jika alat evaluasi yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, maka evaluasi dapat berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dari program yang telah berjalan. Sekolah dapat mengetahui secara spesifik titik-titik lemah dalam implementasi program pendidikan. Setelah kelemahan tersebut terdeteksi, sekolah dapat mencari solusi atau alternatif pemecahan masalah yang sesuai, disesuaikan dengan tingkat permasalahan serta kebutuhan internal lembaga maupun masyarakat eksternal.
- 3) Evaluasi berfungsi sebagai pengukuhan keberhasilan, hal ini dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. Hasil evaluasi akan memberikan gambaran sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya, serta apakah program tersebut layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor seperti guru, siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program hubungan masyarakat di lembaga pendidikan dilakukan guna memperoleh berbagai informasi penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran siswa serta mendukung pengembangan sekolah. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan umpan balik, informasi yang dibutuhkan dalam memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran, serta memperbarui dan mengembangkan program yang ada. Selain itu, evaluasi membantu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran dan menemukan solusi yang tepat. Dari hasil evaluasi tersebut, sekolah dapat mengetahui hal-hal yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan dikembangkan, sehingga program-program yang dijalankan dapat terus berkembang secara dinamis.

3. Pola Kerjasama

Adapun Kerjasama yang diselenggarakan oleh sekolah dengan dunia internal atau eksternal (DU/DI), antara lain:¹⁴

a. Pola Kerjasama Program Permagangan /PKL/ Prakerin

Pelatihan vokasi pada hakikatnya merupakan bentuk pendidikan dan pelatihan yang memadukan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman praktik langsung di dunia industri secara terorganisasi dan selaras, dengan

¹⁴ Yulianto and Budi Sutrisno, "Pengelolaan Kerjasama Sekolah Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 24, no. 1 (2014): 67.

tujuan mencapai penguasaan pengetahuan dan keterampilan tertentu pada jenjang tertentu.

Secara umum, penyelenggaraan program magang industri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa di bidang teknis serta membekali mereka dengan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya kerja di lingkungan industri yang sesungguhnya. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman praktis di dunia nyata, termasuk memahami struktur organisasi dan operasi bisnis suatu perusahaan, serta keterlibatan langsung dalam penerapan teknologi. Lebih jauh lagi, kami bertujuan untuk memupuk kemandirian dalam belajar dan bekerja, meningkatkan keterampilan kerja sama tim, serta mengembangkan potensi dan keahlian individu sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ada beberapa tujuan dalam penyelenggaraan praktik kerja industri, diantaranya:

- 1) Untuk mengembangkan tenaga kerja yang terampil secara professional yakni individu dengan kualifikasi dan etika kerja yang sesuai dengan persyaratan dan standar dunia kerja.
- 2) Meningkatkan hubungan dan kesesuaian antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dan realitas dunia kerja.
- 3) Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan pengalaman praktis langsung di lingkungan industri.

- 4) Memberikan pengakuan serta apresiasi terhadap pengalaman kerja sebagai komponen krusial dalam proses pendidikan secara menyeluruh.¹⁵

b. Pola Kerjasama Program Pelatihan

Sekolah memberikan pengajaran teori dan pelatihan untuk mendukung kegiatan praktik, sedangkan praktik sebenarnya dilaksanakan di dunia usaha dan industri (DUDI). Sebelum praktik dijalankan, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan kepada peserta didik :

- 1) Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar melalui pembelajaran di laboratorium yang meniru lingkungan kerja di perusahaan.
- 2) Mengenalkan peraturan-peraturan yang berlaku di tempat kerja dengan menghadirkan narasumber dari industri atau perusahaan.
- 3) Memastikan siswa memahami keterampilan khusus yang akan dilatih sesuai dengan program keahlian dan tanggung jawab mereka.
- 4) Menanamkan kesadaran bahwa kondisi kerja di industri berbeda dengan di sekolah, dan praktik akan dilakukan di bawah pengawasan instruktur industri.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti sekolah kejuruan tidak hanya mengajarkan mata pelajaran akademik kepada siswa, tetapi lebih menekankan pada pemberian pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan sesuai dengan program dan bidang

¹⁵ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paradigma, 2001).

spesialisasi masing-masing sekolah kejuruan. Terdapat beberapa metode pelaksanaan pelatihan, seperti OJT (on-the-job training) dan OFF-JT (off-the-job training), yang dijelaskan sebagai berikut: ¹⁶

a. On The Job Training.

On the job training (OJT) atau pelatihan langsung di tempat kerja merupakan suatu metode pelatihan di mana pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam lingkungan kerja sesungguhnya dan diajari serta diawasi oleh karyawan atau trainer yang berpengalaman.

b. Off The Job Training

Pelatihan di luar pekerjaan adalah pelatihan yang dilakukan saat karyawan tidak sedang menjalankan tugas atau fungsi pekerjaan sehari-hari.

c. Pola Kerjasama Program Produksi (Produk Inovatif)

Model kerja sama dalam bidang produksi adalah sebuah langkah dalam mengimplementasikan kurikulum menggunakan pendekatan Production Based Education (PBE) yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik secara lebih mendalam. Hal ini dapat tercapai jika fasilitas pendukung seperti peralatan, laboratorium, dan bengkel memadai untuk menjalankan kegiatan produksi. Selain itu, pengajar harus memiliki kompetensi yang setara dengan supervisor industri, baik dalam keterampilan teknis (*hard skill*) maupun keterampilan sosial (*soft skill*). Pendekatan ini disebut *Teaching Factory* dan akan berjalan dengan baik jika sekolah mampu menjalin kemitraan yang erat

¹⁶ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

dengan industri di sekitarnya, yang berfungsi tidak hanya sebagai mitra dalam proses produksi tetapi juga sebagai penyedia jasa atau produk bagi industri tersebut. Seluruh pelaksanaan kegiatan ini akan dikelola secara profesional oleh unit pelaksana teknis produksi dan pelatihan yang berada di bawah naungan bidang kerja sama dan layanan industri di masing-masing Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

d. Pola kerjasama program penyaluran lulusan

Lulusan SMK diinginkan dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan secara langsung, karena tingkat kesuksesan sebuah SMK dapat diukur dari seberapa banyak alumni yang berhasil bekerja. Seorang individu yang telah lulus dari SMK diharapkan memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk diterima di dunia kerja. Kesempatan untuk terserap dalam lingkungan kerja harus terbuka lebar bagi lulusan SMK yang memiliki kompetensi. Keberhasilan lulusan SMK seharusnya mencerminkan pencapaian sasaran dalam mengembangkan keterampilan hidup, sehingga mereka dapat meraih sukses dalam karir mereka. Keberhasilan lulusan tersebut dapat ditinjau dari:

1. Lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Tenggang waktu lulusan mendapatkan kerja setelah lulus maksimal satu tahun.
3. Keterserapan lulusan dalam periode dua Tahun setelah lulus minimal 75%.
4. Jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja 5%.

Kehadiran model kolaboratif dalam program penyaluran lulusan menjadi ujung tombak seluruh mata rantai program pendidikan, karena menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran akhir. Salah satu inisiatif utamanya adalah menjalin kerja sama yang erat dengan dunia industri, dengan harapan semua capaian pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk hasil nyata di dunia kerja. Kerja sama ini tidak hanya meningkatkan pemerataan lulusan, tetapi juga meningkatkan relevansi kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan dunia industri.

B. Dunia Usaha dan Dunia Industri

Menurut Yuliani, DUDI merupakan lingkungan atau tempat di mana seseorang melakukan apa yang dilakukan oleh suatu situs web. Dalam lingkungan ini orang bekerja dan mendapat imbalan berupa upah atau gaji. Suatu pesan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui jenis-jenisnya.¹⁷

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007), dunia usaha dan dunia industri merupakan tempat dimana para individu yang memiliki keterampilan dapat memenuhi tuntutan kerja perusahaan. DUDI juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengolahan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang akhir yang memiliki nilai tambah dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁸

Berdasarkan sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa dunia kerja atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI) merupakan wadah atau tempat

¹⁷ Yuliani Jiwong, *Studi Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Mahasiswa Untuk Memasuki Dunia Kerja* (Yogyakarta: A. Jaya Yogyakarta, 2013).

¹⁸ Depdiknas, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Atau Dunia Industri*, 2007.

penyaluran tenaga kerja sekaligus media penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks ini, individu melakukan berbagai kegiatan kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan memperoleh imbalan atau upah atas pekerjaannya.

Kerjasama antara sekolah dan Dunia Usaha serta Dunia Industri (DUDI) dapat dimaknai sebagai suatu bentuk keterkaitan kelembagaan yang saling menguntungkan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap terjun langsung ke dunia kerja sebagai tenaga kerja yang produktif. Pada dasarnya, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu langsung bekerja dan berkontribusi secara optimal di lingkungan dunia usaha dan industri, menjadikannya sebagai tenaga kerja siap pakai.

Kerjasama yang dibangun antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dapat memberikan berbagai manfaat bagi sekolah, siswa, dan DUDI.¹⁹

a. Manfaat bagi sekolah

1. Menjadi sumber pengembangan untuk kemajuan sekolah dan para lulusannya.
2. Memperoleh informasi terkini mengenai dunia kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian di sekolah.

¹⁹ Radno Harsanto, *Pengelolaan Kelas Yang Dinamis – Paradigm Baru Pembelajaran Menuju Kompetensi Siswa* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

3. Memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti program magang industri.
4. Meningkatkan kemampuan dan pengalaman praktis guru dalam dunia kerja.
5. Menjadi tempat bagi siswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri (Prakerin).
6. Berfungsi sebagai jalur penyaluran lulusan ke dunia kerja.
7. Menambah wawasan terhadap perkembangan teknologi terbaru.
8. Berpeluang mendapatkan dukungan berupa bahan praktik dari industri.
9. Membantu dalam pemeliharaan peralatan serta peningkatan kesejahteraan staf.
10. Memperpendek masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.
11. Menjadi tempat pelaksanaan pembelajaran berbasis praktik melalui konsep *Teaching Factory*.

b. Manfaat bagi siswa

1. Membuka cakrawala pengetahuan dan pemahaman terhadap dunia kerja.
2. Menjadi media untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan praktis.
3. Memberikan pengalaman nyata dalam menjalani peran sebagai tenaga kerja.
4. Menyediakan bekal pembinaan karakter dan etika kerja.

c. Manfaat bagi dunia kerja

1. Menjadi sumber potensial dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten.
2. Menjadi kontribusi nyata dari perusahaan kepada masyarakat setempat.
3. Sebagai sarana untuk meningkatkan citra dan promosi perusahaan.
4. Berkontribusi dalam perluasan jangkauan pasar dan distribusi produk.
5. Berfungsi sebagai referensi dalam proses pengkomunikasian teknologi dan informasi terkini.

C. Kompetensi Peserta Didik di Sekolah Menengah Kejuruan

1. Pengertian Kompetensi

Istilah kompetensi memiliki berbagai pengertian yang menekankan pada aspek-aspek tertentu, tergantung dari sudut pandang penggunaannya. Secara etimologis, kata “kompetensi” berasal dari bahasa Inggris *competence*, yang berarti kecakapan, kemampuan, atau kewenangan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik. Dalam konteks pendidikan, kompetensi merujuk pada seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang sebagai hasil dari proses pembelajaran. Kompetensi tidak hanya mencerminkan kemampuan kognitif (pengetahuan), tetapi juga mencakup aspek afektif (sikap dan nilai) serta psikomotorik (keterampilan praktis), yang secara menyeluruh tercermin dalam kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak.

Kompetensi dapat diartikan sebagai kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam kebiasaan berpikir

dan bertindak. Konsistensi dan kelanjutan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak memungkinkan seseorang menjadi kompeten, yang berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan.

Seseorang dianggap memiliki kompetensi jika mampu melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Spencer yang mendefinisikan kompetensi sebagai tampilan kinerja dalam suatu situasi tertentu. Menurutnya, kompetensi lebih ditekankan pada bentuk nyata, yaitu hasil kerja atau performa yang terlihat.²⁰ Sementara itu, Stephen J. Kenezovich menyatakan bahwa kompetensi merupakan sekumpulan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kenezovich menjelaskan bahwa kemampuan tersebut merupakan hasil kombinasi dari berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan teknis, kepemimpinan, kecerdasan, serta unsur lainnya yang dimiliki seseorang untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif.²¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan yang mencakup aspek *sikap, pengetahuan, dan keterampilan* dalam bentuk *hard skills* dan *soft skills*.²² Seseorang dapat dikatakan kompeten dalam suatu bidang apabila memiliki kemampuan atau pengalaman yang sesuai dengan persyaratan dan tuntutan pekerjaan di bidang tersebut. Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dapat dijadikan modal utama untuk

²⁰ Abdul Majid and Dian Andriani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: remaja rosda karya, 2006).

²¹ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

²² *PP Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.

menciptakan lapangan kerja atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Kompetensi merujuk pada kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Jenis kemampuan yang beragam ini mencakup pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, kecerdasan, dan hal-hal lain yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada buku yang ditulis Sanjaya menjelaskan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut:²³

1. Pengetahuan (knowledge)

Yaitu wawasan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu; misalnya, individu akan mampu menerapkan proses berpikir ilmiah dalam memecahkan suatu masalah jika ia memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur atau tahapan dalam berpikir ilmiah.

2. Pemahaman (understanding)

Pemahaman merujuk pada kedalaman dalam menguasai konsep—baik secara kognitif maupun afektif. Tidak cukup hanya mengetahui, individu juga harus memahami makna dari konsep tersebut.

3. Keterampilan (skill)

Keterampilan (skill) adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu secara efektif dan efisien, yang diperoleh melalui proses belajar, pelatihan, atau pengalaman. Keterampilan dapat

²³ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

bersifat teknis (*hard skill*), seperti mengoperasikan mesin atau menggunakan perangkat lunak, maupun non-teknis (*soft skill*), seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim.

4. Nilai (value)

Yaitu standar atau prinsip perilaku yang telah tertanam dalam diri seseorang, dan secara tidak langsung memengaruhi cara berpikir dan bertindak. Misalnya standar perilaku siswa dalam melaksanakan proses berpikir seperti keterbukaan, kejujuran, demokratis, kasih sayang, dan lain sebagainya.

5. Sikap (attitude)

Yaitu bentuk reaksi atau respon emosional terhadap situasi tertentu, yang memengaruhi cara seseorang menerima dan menghadapi perubahan atau kebijakan.

6. Minat (interest)

Yaitu Minat adalah dorongan internal atau kecenderungan untuk melakukan suatu kegiatan dengan penuh antusias. Minat menjadi pendorong penting dalam mencapai kompetensi. Misalnya siswa yang memiliki minat tinggi dalam mata pelajaran tertentu akan lebih terdorong untuk mendalami dan menguasai materi tersebut secara mendalam.

2. Kompetensi Peserta Didik di SMK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah yang secara khusus dirancang untuk menyiapkan peserta didik agar siap memasuki dunia kerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha sesuai

bidang keahliannya. Oleh karena itu, kompetensi peserta didik SMK disusun berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta diarahkan untuk mencapai kualifikasi tenaga kerja tingkat menengah.²⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, kompetensi peserta didik SMK mencakup:

- 1) Kompetensi pengetahuan (kognitif): penguasaan konsep, prinsip, dan teori dalam bidang keahlian tertentu.
- 2) Kompetensi keterampilan (psikomotorik): kemampuan teknis yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan nyata, seperti merakit, mengoperasikan, atau memperbaiki peralatan.
- 3) Kompetensi sikap (afektif): etika kerja, disiplin, tanggung jawab, kerja sama tim, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja.

Kompetensi peserta didik SMK dikembangkan melalui kurikulum yang terintegrasi dengan praktik industri, seperti:

- 1) Praktik Kerja Lapangan (PKL): memberikan pengalaman kerja nyata di dunia industri.
- 2) Uji Kompetensi Keahlian (UKK): menilai penguasaan siswa terhadap kompetensi yang ditentukan.
- 3) Sertifikasi Kompetensi: sebagai pengakuan formal terhadap keterampilan siswa sesuai standar industri.

²⁴ Arina Hidayat, "Relevansi Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dan Industri (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Batang)," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis* 1, no. November (2015): 2.

Tujuan utama dari pengembangan kompetensi di SMK adalah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu bersaing di era global, memiliki daya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.